

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sejak ditetapkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah diberi kewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih efektif dalam menyelenggarakan pemerintahannya guna memajukan daerahnya masing-masing. Setiap daerah dituntut agar dapat mengedepankan kemandirian daerahnya dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya kemandirian dalam bidang keuangan.

Pemerintah daerah sudah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila ketergantungan keuangannya pada pusat memiliki persentasi yang kecil. Untuk menciptakan kemandirian keuangan pada suatu daerah, masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerahnya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang dimana merupakan konsekuensi menjalankan otonomi daerah (Octovido, 2014).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD

yang sah. Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada Pajak Daerah karena seperti yang diketahui pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Malaka mampu memaksimalkan potensi dari pajak daerah agar pajak daerah dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Malaka. Dengan demikian, tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Malaka dapat meningkat karena ketergantungannya akan pusat juga berkurang.

Menurut Jones dan Pendlebury dalam Halim (2004), yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu ukuran berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Dalam perhitungan efektivitas, kemampuan suatu daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mendekati 100%. Maka dapat disimpulkan apabila semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik pula kemampuan daerah tersebut. Sama halnya dengan pajak daerah, apabila menghasilkan angka atau persentase mendekati 100%, maka pemungutan pajak daerah dapat dikatakan makin efektif.

Menurut Anggraeni (2012) kontribusi Pajak Daerah adalah kontribusi yang berasal dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana merupakan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi pajak terhadap pajak daerah dimana merupakan rasio antara total masing-masing jenis pajak terhadap total pajak daerah pada satu tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar

kecilnya peran pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan besar kecilnya masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah. Sedangkan Kemandirian keuangan daerah adalah seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya, pelayanannya kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya tanpa bantuan dari pemerintah pusat/provinsi (Halim, 2004).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Malaka dan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malaka. Kemudian, dilakukan pengumpulan data dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Data yang sudah terkumpul dilakukan proses berikutnya yaitu perhitungan secara kuantitatif efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malaka dengan menggunakan metode analisis rasio, disajikan dalam bentuk tabel.

Efektivitas Pajak Daerah merupakan suatu kondisi yang erat kaitannya dengan pemungutan pajak daerah. Analisis efektivitas pajak daerah dilakukan guna mengetahui seberapa efektifnya pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Berdasarkan hasil analisis efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Malaka tahun 2014 hingga tahun 2018 tingkat efektivitas pajak daerah masuk kategori sangat efektif kecuali tahun 2018. Pada tahun

2018 pajak daerah tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor yang menyebabkan kecilnya rasio efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2018 adalah karena tidak tercapainya target yang telah ditetapkan untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara signifikan. Hal ini sangat mempengaruhi rendahnya rasio efektivitas pada tahun tersebut dikarenakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pajak daerah Kabupaten Malaka. Penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diduga karena pada tahun tersebut belanja modal yang terjadi tidak sebesar sebelumnya, atau dapat dikatakan pembangunan infrastruktur pada tahun tersebut tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berpengaruh pada besarnya pajak yang masuk dari mineral bukan logam dan batuan.

Kontribusi pajak terhadap pajak daerah merupakan suatu kontribusi yang diberikan oleh masing-masing jenis pajak bagi pajak daerah. Sedangkan kontribusi pajak daerah bagi pendapatan asli daerah merupakan suatu kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap Pajak Daerah Kabupaten Malaka tahun 2014 hingga 2018, diketahui bahwa jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pajak Daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PBB-p2. Kedua jenis pajak ini dikatakan memberi kontribusi terbesar karena realisasi yang dihasilkan setiap tahunnya mencapai angka

satu miliar rupiah. Untuk jenis pajak yang memberikan kontribusi sedang bagi Pajak Daerah Kabupaten Malaka tahun 2014 hingga 2018 adalah Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan. Kedua jenis pajak ini dikatakan memberi kontribusi sedang, karena setiap tahunnya realisasi yang dihasilkan mencapai angka seratus juta rupiah. Sedangkan kontribusi terkecil dari masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah Kabupaten Malaka tahun 2014 hingga 2018 adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Bawah Tanah. Keempat jenis pajak ini dikatakan memberikan kontribusi terkecil bagi Pajak Daerah karena setiap tahunnya realisasi yang dihasilkan hanya berkisar pada angka puluhan juta rupiah. Kontribusi dari masing-masing jenis pajak daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan adalah pajak restoran, pajak penerangan jalan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini membuktikan bahwa jenis pajak tersebut memiliki potensi yang besar bagi pajak daerah Kabupaten Malaka. Dengan demikian, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan pemungutan dari jenis-jenis pajak tersebut sehingga pajak daerah dapat terus meningkat setiap tahunnya dan dapat juga meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Malaka. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, kontribusi dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2014 hingga 2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali tahun 2018. Faktor penyebabnya adalah dikarenakan pada tahun 2018 terdapat salah satu jenis pajak daerah yang tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga

mengakibatkan pajak daerah pada tahun tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik. Tingkat kontribusi pajak daerah sendiri terhadap PAD berfluktuatif dari tahun 2014 hingga 2018. Hal tersebut dikarenakan kenaikan pajak daerah dari tahun ke tahun tidak sejalan dengan kenaikan PAD. Kenaikan PAD selama kurun waktu lima tahun meningkat signifikan, sedangkan kenaikan pajak daerah meningkat secara bertahap setiap tahunnya. Peningkatan PAD sebagian besar berasal dari komponen non-pajak sehingga mengakibatkan tingkat kontribusi dari pajak daerah sendiri masih dibawah 50%. Upaya strategi dalam meningkatkan kontribusi dari pajak daerah, yaitu:

- a) Mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Malaka. Dengan mengembangkan sektor pariwisata, para wisatawan dari luar daerah dapat berkunjung ke Kabupaten Malaka untuk menikmati wisata tersebut. Hal ini akan berpengaruh pada pajak hotel dan pajak restoran. Salah satu cara untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Malaka yaitu dengan membuat suatu website yang berguna untuk memperkenalkan wisata-wisata apa saja yang terdapat di Kabupaten Malaka.
- b) Sosialisasi bagi para pemilik restoran dalam hal pembebanan pajak restoran bagi konsumen. Dengan demikian, pajak restoran tidak lagi ditanggung oleh para pemilik restoran.
- c) Memberlakukan sistem online dalam administrasi perpajakan dan bekerjasama dengan bank-bank yang ada dalam hal pembayaran pajak.

Dengan demikian, para wajib pajak dapat lebih mudah mengurus urusan perpajakannya dan dengan adanya sistem online ini akan mengurangi tingkat kecurangan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

- d) Bekerjasama dengan PLN dalam hal perluasan jaringan listrik di desa-desa yang belum ada listriknya.
- e) Meningkatkan belanja modal dengan cara pengadaan infrastruktur seperti jembatan, jalan dan bangunan. Upaya ini dapat meningkatkan pajak galian golongan C di Kabupaten Malaka.
- f) Sosialisasi mengenai pemanfaatan air tanah dalam suatu usaha. Selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, upaya ini juga dapat meningkatkan pajak air bawah tanah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahannya. Berdasarkan hasil analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malaka selama tahun 2014 hingga 2018, diketahui bahwa rasio kemandirian Kabupaten Malaka mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun. Hal ini membuktikan bahwa, Kabupaten Malaka tiap tahunnya dapat menggali potensi di daerahnya secara baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Malaka. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Malaka dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakat. Kabupaten Malaka masih merupakan

Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Belu sehingga dapat dikatakan Kabupaten ini masih sangat membutuhkan bantuan dari pusat guna memaksimalkan kegiatan pemerintahannya. Berbeda dengan Kabupaten-Kabupaten lain yang sudah lama, Kabupaten Malaka masih sangat membutuhkan banyak dana dari pusat guna meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Kabupaten tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan daerah. Guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malaka, pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan hasil pendapatan asli daerahnya. Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam penelitian ini, fokus peneliti hanya pada komponen pajak daerah. Hal tersebut dikarenakan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Oleh sebab itu, diharapkan pajak daerah juga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Malaka apabila dikelola secara maksimal. Karena Kabupaten Malaka masih merupakan Kabupaten baru, diharapkan pemerintah daerah mampu menggali lebih dalam lagi potensi-potensi dari pajak daerah sehingga mampu mengoptimalkan hasil dari pajak daerah itu sendiri.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penetapan target pada tahun-tahun awal berdirinya Kabupaten Malaka masih merujuk pada data dari Kabupaten Belu, sehingga target yang di tetapkan kadang tidak sesuai dengan kondisi potensi yang ada di Kabupaten Malaka.
2. Sistem pajak daerah di Kabupaten Malaka masih dilakukan secara manual, sehingga masih sulit untuk menyerap potensi dari pajak daerah secara maksimal.
3. Tingkat kontribusi yang diberikan oleh masing-masing jenis pajak daerah hampir semuanya dikategorikan sangat kurang, kecuali pajak mineral bukan logam dan batuan yang dikategorikan sangat baik.

C. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya dan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

1. Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat mengukur secara akurat potensi-potensi yang ada di Kabupaten Malaka agar target yang ditetapkan tidak melebihi dari potensi yang ada.
2. Sebaiknya pemerintah daerah mulai menerapkan sistem online pajak daerah sehingga penyelenggaraan administrasi perpajakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, potensi dari pajak daerah juga dapat diserap secara maksimal, memudahkan wajib

pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah.

3. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Malaka khususnya Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bisa lebih mengintensifikasi lagi pajak daerah yang telah ada guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu, perlu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, peningkatan mekanisme dan prosedur penarikan pajak daerah. Dengan demikian, diharapkan kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah dapat meningkat dan pemerintah Kabupaten Malaka dapat terus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah sehingga pajak daerah dapat mendongkrak pendapatan asli daerah di Kabupaten Malaka. Apabila pendapatan asli daerah meningkat, maka secara otomatis dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malaka.

Daftar Pustaka

- Aji, A. K. (2012). Penerapan Sistem Good Governance pada Sektor Publik dan Privat. *Universitas Negeri Jenderal Soedirman*.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anggraeni, D. (2012). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Arditia, R. (2013). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2007-2011. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia.
- Bastian, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2013). *Manajemen, Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hartono, J. (2014). *Metode Penelitian Bisnis edisi 6*. Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan*.
- Kuncoro, M. (2014). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi edisi 4*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Natsir, A. A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013. *Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Safrijal, Basyanah, M. N., Ali, H. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyah*.

Suandy, E. (2017). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugianto. (2007). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Cikal Sakti.

Sutriani, A. (2017). Analisis Kemandirian Dan Ketergantungan Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Keuangan Universitas Jambi*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Website

Kabupaten Malaka, (2019), diakses dari https://kupang.bpk.go.id/?page_id=6427 pada tanggal 11 Juni 2019.

Buku Pedoman Umum Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah, (2019), diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9488> pada tanggal 27 Oktober 2019.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Nomor : 3114/R/I
Hal : Ijin Penelitian

2 Agustus 2019

Kepada:

Yth. Pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
Jalan Wemalae, Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah Kabupaten Malaka, NTT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul "**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah**" yang dilakukan oleh mahasiswa kami dengan identitas:

Nama : Maria S Indri Seran
No_Mhs : 22069 /AKUNTANSI
No_HP : 081358639055
Alamat : Jalan Tambakbayan 11 no.12 Yogyakarta

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan:

1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kabupaten Malaka tahun 2014-2018
2. Target pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Malaka tahun 2014-2018

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa ini merupakan karya ilmiah yang memiliki tujuan dan sifat keilmuan. Oleh karenanya tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan I,



Drs. Asgus Budi R., M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
RINGKASAN REALISASI APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	REALISASI (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	371.578.311.468,00	373.089.957.609,39	(1.447.555.280,61)	100,41	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.360.533.067,00	15.672.402.905,39	(4.614.467.983,61)	90,28	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.577.665.708,00	5.100.442.567,79	1.522.776.859,79	142,56	
4.1.1.01	Pajak Hotel	6.720.000,00	34.028.500,00	27.308.500,00	506,38	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	6.720.000,00	34.028.500,00	27.308.500,00	506,38	
4.1.1.02	Pajak Restoran	151.853.795,00	349.910.373,00	198.056.578,00	230,43	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	151.853.795,00	349.910.373,00	198.056.578,00	230,43	
4.1.1.04	Pajak Reklame	51.261.125,00	58.279.581,00	7.018.456,00	113,69	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	51.261.125,00	58.279.581,00	7.018.456,00	113,69	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	488.714.255,00	479.987.775,00	(8.726.480,00)	98,21	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	488.714.255,00	479.987.775,00	(8.726.480,00)	98,21	
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.000.000.000,00	3.155.968.438,79	1.155.968.438,79	157,80	
4.1.1.06.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	3.155.968.438,79	1.155.968.438,79	157,80	
4.1.1.11	Pajak Daerah Lainnya	25.000.000,00	9.704.513,00	(15.295.487,00)	38,82	
4.1.1.11.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	25.000.000,00	9.704.513,00	(15.295.487,00)	38,82	
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	854.116.533,00	1.012.563.387,00	158.446.854,00	118,55	
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	854.116.533,00	1.012.563.387,00	158.446.854,00	118,55	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.757.539.000,00	1.855.680.612,03	(2.901.858.387,97)	39,01	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	4.154.000.000,00	1.318.444.387,03	(2.835.555.612,97)	31,74	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.104.000.000,00	1.262.350.387,03	(2.841.649.612,97)	30,76	
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	40.000.000,00	40.385.000,00	385.000,00	100,96	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	10.000.000,00	15.709.000,00	5.709.000,00	157,09	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	553.539.000,00	489.266.500,00	(64.272.500,00)	88,39	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	22.000.000,00	8.753.000,00	(13.247.000,00)	39,79	
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	241.939.000,00	304.753.300,00	62.814.300,00	125,96	
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	33.000.000,00	35.327.000,00	2.327.000,00	107,05	
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	39.100.000,00	36.530.000,00	(2.570.000,00)	93,43	
4.1.2.02.13	Retribusi Rumah Potong Hewan	200.000.000,00	55.812.000,00	(144.188.000,00)	27,91	
4.1.2.02.14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	17.500.000,00	48.091.200,00	30.591.200,00	274,81	
4.1.2.03	Retribusi Ijin Usaha	50.000.000,00	47.969.725,00	(2.030.275,00)	95,94	
4.1.2.03.01	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00	47.969.725,00	(2.030.275,00)	95,94	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	47.969.725,00	(2.030.275,00)	95,94	

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	REALISASI (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.025.328.359,00	8.716.279.725,57	(3.235.386.455,43)	96,58	
1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	128.700.000,00	82.056.600,00	(46.643.400,00)	63,76	
1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	10.000.000,00	529.750,00	(9.470.250,00)	5,30	
1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	4.000.000,00	3.690.000,00	(310.000,00)	92,25	
1.4.01.19	Dealer Motor, Subsidi Agen BBM, Rekomendasi BBM dan Kontrak Proyek	109.700.000,00	76.730.850,00	(32.969.150,00)	69,95	
1.4.01.20	Penjualan Barang-barang Rongsokan	5.000.000,00	1.106.000,00	(3.894.000,00)	22,12	
1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	850.000.000,00	1.353.875.697,00	503.875.697,00	159,28	
1.4.02.01	Jasa Giro Kes Daerah	850.000.000,00	1.353.875.697,00	503.875.697,00	159,28	
1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	300.000.000,00	419.026.856,00	119.026.856,00	139,68	
1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	300.000.000,00	419.026.856,00	119.026.856,00	139,68	
1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	115.882.359,00	96.887.255,00	(18.995.104,00)	83,61	
1.4.04.01	Kerugian Uang	115.882.359,00	96.887.255,00	(18.995.104,00)	83,61	
1.4.14	Penerimaan Lain-Lain	0,00	28.809.995,57	28.809.995,57	0,00	
1.4.14.01	Penerimaan Lain-Lain	0,00	28.809.995,57	28.809.995,57	0,00	
1.4.15	Ijin Penjualan Temak	55.000.000,00	52.940.000,00	(2.060.000,00)	96,25	
1.4.15.01	Ijin Pengeluaran Temak	55.000.000,00	52.940.000,00	(2.060.000,00)	96,25	
1.4.16	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	7.575.746.000,00	3.756.345.500,00	(3.819.400.500,00)	49,58	
1.4.16.01	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Betun	1.140.000.000,00	768.772.500,00	(371.227.500,00)	67,44	
1.4.16.02	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Fahiluka	247.328.600,00	1.234.500,00	(246.094.100,00)	0,50	
1.4.16.03	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Besikama	1.031.200.000,00	604.034.000,00	(427.166.000,00)	58,58	
1.4.16.04	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Weliman	713.375.000,00	367.728.000,00	(345.647.000,00)	51,55	
1.4.16.05	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Weoe	776.124.000,00	371.631.000,00	(404.493.000,00)	47,88	
1.4.16.06	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nanfalus	622.535.400,00	320.454.000,00	(302.081.400,00)	51,48	
1.4.16.07	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Alas	252.810.000,00	126.711.000,00	(126.099.000,00)	50,12	
1.4.16.08	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Seon	367.308.000,00	187.188.000,00	(180.120.000,00)	50,96	
1.4.16.09	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sarina	180.956.000,00	89.559.000,00	(91.397.000,00)	49,49	
1.4.16.10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tunabesi	450.848.000,00	209.083.500,00	(241.764.500,00)	46,38	
1.4.16.11	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kaputu	373.209.000,00	161.232.000,00	(211.977.000,00)	43,20	
1.4.16.12	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Uabau	277.184.000,00	170.982.000,00	(106.202.000,00)	61,69	
1.4.16.13	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nurobo	255.000.000,00	81.180.000,00	(173.820.000,00)	31,84	
1.4.16.14	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wekmidar	141.856.000,00	48.000,00	(141.808.000,00)	0,03	
1.4.16.15	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Oekmurak	314.000.000,00	213.924.000,00	(100.076.000,00)	68,13	
1.4.16.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Biudukfoho	374.508.000,00	82.308.000,00	(292.200.000,00)	21,98	
1.4.16.17	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tafuli	57.504.000,00	276.000,00	(57.228.000,00)	0,48	
	Dana Non Kapitasi JKN	0,00	2.926.337.822,00	2.926.337.822,00	0,00	
	Dana Non Kapitasi JKN	0,00	2.926.337.822,00	2.926.337.822,00	0,00	
1.4.17	Penjualan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.17.01	Penjualan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	REALISASI (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
. 2	DANA PERIMBANGAN					
. 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	291.165.690.897,00	291.471.810.100,00	306.119.203,00	100,11	
. 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	6.077.022.897,00	6.383.142.100,00	306.119.203,00	105,04	
. 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.791.791.917,00	5.312.982.711,00	521.190.794,00	110,88	
. 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3.779.437.243,00	4.508.844.718,00	729.407.475,00	119,30	
. 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.012.354.674,00	804.137.993,00	(208.216.681,00)	79,43	
. 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	1.285.230.980,00	1.070.159.389,00	(215.071.591,00)	83,27	
. 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	2.668.516,00	1.885.173,00	(783.343,00)	70,64	
. 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	697.843.081,00	488.490.156,00	(209.352.925,00)	70,00	
. 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	371.118.780,00	259.783.146,00	(111.335.634,00)	70,00	
. 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	201.207.243,00	191.591.205,00	(9.616.038,00)	95,22	
. 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	12.393.360,00	12.393.360,00	0,00	100,00	
		0,00	116.016.349,00	116.016.349,00	0,00	
. 2 . 2	Dana Alokasi Umum	285.088.668.000,00	285.088.668.000,00	0,00	100,00	
. 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	285.088.668.000,00	285.088.668.000,00	0,00	100,00	
. 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	285.088.668.000,00	285.088.668.000,00	0,00	100,00	
. 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
. 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
. 2 . 3 . 01 . 01	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.052.087.504,00	65.945.744.604,00	2.860.793.500,00	104,59	
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00	
1 . 3 . 1 . 02	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00	
1 . 3 . 1 . 02 . 01	Pemerintah Daerah Kabupaten Belu	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00	
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.876.135.504,00	7.769.792.604,00	2.860.793.500,00	159,34	
1 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	4.876.135.504,00	7.769.792.604,00	2.860.793.500,00	159,34	
1 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	253.269.555,00	879.762.575,00	626.493.020,00	347,36	
1 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	77.656.519,00	1.278.463.855,00	1.200.807.336,00	1.646,31	
1 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	719.643.000,00	1.816.851.197,00	1.097.208.197,00	252,47	
1 . 3 . 3 . 01 . 06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.234.545,00	0,00	(1.234.545,00)	0,00	
1 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil Pajak Rokok	3.824.331.885,00	3.761.851.377,00	(62.480.508,00)	98,37	
1 . 3 . 3 . 01 . 09	Bagi Hasil Ternak Potong Hewan	0,00	32.863.600,00	32.863.600,00	0,00	
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52.037.952.000,00	52.037.952.000,00	0,00	100,00	
1 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	52.037.952.000,00	52.037.952.000,00	0,00	100,00	
1 . 3 . 4 . 01 . 01	Dana Tunjangan Profesi Guru	50.102.952.000,00	50.102.952.000,00	0,00	100,00	
1 . 3 . 4 . 01 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	1.935.000.000,00	1.935.000.000,00	0,00	100,00	
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.138.000.000,00	3.138.000.000,00	0,00	100,00	
1 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	3.138.000.000,00	3.138.000.000,00	0,00	100,00	
1 . 3 . 5 . 01 . 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi dalam rangka Pelaksanaan Pemerintahan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00	
1 . 3 . 5 . 01 . 02	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Guru Kontrak Provinsi	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.a : PERATURAN BUPATI MALAKA
 Nomor : 53 TAHUN 2016
 Tanggal : 13 SEPTEMBER 2016



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
 RINGKASAN REALISASI APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)	REALISASI (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	615,652,148,229.00	595,360,001,844.00	(20,292,146,385.00)	96.70	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22,681,991,221.00	25,020,134,187.00	2,038,142,966.00	108.87	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4,794,347,842.00	5,878,859,729.23	884,511,887.23	118.45	
4.1.1.01	Pajak Hotel	11,177,000.00	12,337,000.00	1,160,000.00	110.38	
4.1.1.01.07	Hotel Melalui Tiga	11,177,000.00	12,337,000.00	1,160,000.00	110.38	
4.1.1.02	Pajak Restoran	400,031,642.00	640,047,403.00	240,015,761.00	160.00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	400,031,642.00	640,047,403.00	240,015,761.00	160.00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	75,139,200.00	67,366,357.00	(17,772,843.00)	76.35	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	75,139,200.00	67,366,357.00	(17,772,843.00)	76.35	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	590,000,000.00	785,143,163.00	195,143,163.00	133.08	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	590,000,000.00	710,142,656.00	120,142,656.00	120.38	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0.00	75,000,507.00	75,000,507.00	0.00	
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2,500,000,000.00	3,333,052,100.23	833,052,100.23	133.32	
4.1.1.06.08	Batu Gunung/Kali	2,500,000,000.00	0.00	(2,500,000,000.00)	0.00	
4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	0.00	3,333,052,100.23	3,333,052,100.23	0.00	
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,200,000,000.00	833,780,631.00	(366,219,369.00)	69.48	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	1,200,000,000.00	29,870,255.00	(1,170,129,745.00)	1.72	
4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	0.00	813,909,376.00	813,909,376.00	0.00	
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18,000,000.00	17,153,075.00	(846,925.00)	95.29	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	18,000,000.00	15,469,075.00	(2,530,925.00)	85.94	
4.1.1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	0.00	1,684,000.00	1,684,000.00	0.00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,604,847,000.00	6,465,557,286.45	(129,089,713.55)	98.04	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	5,958,727,000.00	6,015,586,015.45	56,859,015.45	100.95	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	5,554,000,000.00	2,110,798,921.88	(3,443,201,078.12)	38.00	
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	0.00	3,581,649,093.57	3,581,649,093.57	0.00	
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	85,000,000.00	27,830,000.00	(57,170,000.00)	32.74	
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	319,727,000.00	295,310,000.00	(24,417,000.00)	92.38	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	355,920,000.00	258,588,971.00	(97,331,029.00)	72.65	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakalan Ketayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	124,180,000.00	117,720,471.00	(6,459,529.00)	94.80	
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	45,000,000.00	52,471,000.00	7,471,000.00	116.60	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)	REALISASI (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2.02.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	12,000,000.00	17,227,500.00	5,227,500.00	143.56	
4.1.2.02.19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	54,740,000.00	36,490,000.00	(18,250,000.00)	66.66	
4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	120,000,000.00	34,680,000.00	(85,320,000.00)	28.90	
4.1.2.03	Retribusi Pertizinan Tertentu	280,000,000.00	191,382,300.00	(88,617,700.00)	68.35	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	150,000,000.00	51,206,200.00	(98,793,800.00)	34.14	
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	75,000,000.00	72,696,100.00	(2,303,900.00)	96.93	
4.1.2.03.13	Retribusi Ijin Pengetuaran Tembak	55,000,000.00	65,980,000.00	10,980,000.00	119.96	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11,592,996,379.00	12,875,717,171.32	1,282,720,792.32	111.06	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipsahkan	129,000,000.00	179,235,754.00	50,235,754.00	138.94	
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	2,500,000.00	2,020,000.00	(480,000.00)	80.80	
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	2,500,000.00	525,300.00	(1,974,700.00)	21.01	
4.1.4.01.14	Penjualan Hasil Kehutanan	100,000,000.00	100,087,614.00	87,614.00	100.09	
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	4,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	200.00	
4.1.4.01.21	Hasil Penjualan Lainnya	20,000,000.00	68,602,840.00	48,602,840.00	343.01	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	2,755,583,176.00	3,579,235,200.00	823,652,024.00	129.89	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	2,755,583,176.00	3,555,284,053.00	799,700,877.00	129.02	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	0.00	23,951,147.00	23,951,147.00	0.00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	1,016,784,844.00	1,111,677,474.00	94,892,630.00	109.33	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	1,016,784,844.00	1,111,677,474.00	94,892,630.00	109.33	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	115,882,359.00	9,200,000.00	(106,682,359.00)	7.94	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	115,882,359.00	9,200,000.00	(106,682,359.00)	7.94	
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	34,347,998.45	34,347,998.45	0.00	
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	0.00	11,643,927.00	11,643,927.00	0.00	
4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang	0.00	12,799,731.45	12,799,731.45	0.00	
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan	0.00	1,043,240.00	1,043,240.00	0.00	
4.1.4.06.10	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	0.00	6,861,100.00	6,861,100.00	0.00	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	0.00	8,181,480.07	8,181,480.07	0.00	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0.00	187,837.00	187,837.00	0.00	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0.00	128,501.16	128,501.16	0.00	
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	0.00	7,406,528.91	7,406,528.91	0.00	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0.00	441,873.00	441,873.00	0.00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	
4.1.4.08.15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	0.00	344,743,640.00	344,743,640.00	0.00	
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0.00	18,524,496.00	18,524,496.00	0.00	
4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	0.00	326,219,144.00	326,219,144.00	0.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)	REALISASI (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
4.1.4.16	Perjalanan Dinas					
	Pendapatan BLUD	7,575,746,000.00	3,496,612,000.00	(4,079,234,000.00)	46.15	
4.1.4.16.05	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Betun	1,140,000,000.00	624,399,000.00	(515,601,000.00)	54.77	
4.1.4.16.06	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Fahluka	247,328,800.00	73,401,750.00	(173,926,850.00)	29.68	
4.1.4.16.07	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Besikama	1,031,200,000.00	558,283,250.00	(472,936,750.00)	54.14	
4.1.4.16.08	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Weliman	713,375,000.00	342,559,500.00	(370,815,500.00)	48.02	
4.1.4.16.09	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Weoe	776,124,000.00	344,214,375.00	(431,909,625.00)	44.35	
4.1.4.16.10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nanfalus	622,535,400.00	290,256,000.00	(332,279,400.00)	46.62	
4.1.4.16.11	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Alas	252,810,000.00	115,233,750.00	(137,576,250.00)	45.56	
4.1.4.16.12	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Seon	367,308,000.00	170,285,000.00	(197,022,000.00)	46.36	
4.1.4.16.13	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sarina	180,956,000.00	81,366,000.00	(99,590,000.00)	44.96	
4.1.4.16.14	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tunabasi	450,848,000.00	242,524,125.00	(208,323,875.00)	53.79	
4.1.4.16.15	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kaputu	373,209,000.00	146,539,500.00	(226,669,500.00)	39.26	
4.1.4.16.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Uabbau	277,184,000.00	144,020,250.00	(133,163,750.00)	51.96	
4.1.4.16.17	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nurobo	255,000,000.00	93,882,500.00	(161,117,500.00)	36.74	
4.1.4.16.18	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wekmidar	141,856,000.00	43,200,000.00	(98,656,000.00)	30.45	
4.1.4.16.19	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Oekmurak	314,000,000.00	83,205,000.00	(230,795,000.00)	26.50	
4.1.4.16.20	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Bludukitcho	374,508,000.00	100,842,750.00	(273,665,250.00)	26.93	
4.1.4.16.21	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahuli	57,504,000.00	42,518,250.00	(14,985,750.00)	73.94	
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0.00	1,184,259,343.80	1,184,259,343.80	0.00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0.00	1,184,259,343.80	1,184,259,343.80	0.00	
4.1.4.19	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0.00	6,383,000.00	6,383,000.00	0.00	
4.1.4.19.01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0.00	6,383,000.00	6,383,000.00	0.00	
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0.00	2,516,224,893.00	2,516,224,893.00	0.00	
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0.00	2,516,224,893.00	2,516,224,893.00	0.00	
4.1.4.23	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	0.00	6,632,000.00	6,632,000.00	0.00	
4.1.4.23.01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah	0.00	6,632,000.00	6,632,000.00	0.00	
4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	0.00	399,020,188.00	399,020,188.00	0.00	
4.1.4.24.01	Penerimaan Lain-lain	0.00	399,020,188.00	399,020,188.00	0.00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	486,366,958,000.00	471,129,024,450.00	(15,237,933,550.00)	96.67	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,523,919,000.00	7,955,074,450.00	(2,568,844,550.00)	75.59	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	9,451,992,000.00	7,205,399,800.00	(2,246,592,200.00)	76.23	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	7,057,992,000.00	6,150,531,000.00	(907,361,000.00)	87.14	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	1,757,948,000.00	1,054,768,800.00	(703,179,200.00)	60.00	
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	636,052,000.00	0.00	(636,052,000.00)	0.00	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,071,927,000.00	749,674,650.00	(322,252,350.00)	69.94	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,897,000.00	1,213,650.00	(1,483,350.00)	45.00	
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	127,383,000.00	82,790,400.00	(44,592,600.00)	64.99	
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0.00	2,733,300.00	2,733,300.00	0.00	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Penikanan	915,093,000.00	640,565,100.00	(274,527,900.00)	70.00	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	0.00	3,644,400.00	3,644,400.00	0.00	
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	26,754,000.00	18,727,800.00	(8,026,200.00)	70.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)	REALISASI (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2	Dana Alokasi Umum	412,497,589,000.00	412,497,589,000.00	0.00	100.00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	412,497,589,000.00	412,497,589,000.00	0.00	100.00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	412,497,589,000.00	412,497,589,000.00	0.00	100.00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	83,345,450,000.00	50,676,361,000.00	(12,669,089,000.00)	80.00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	83,345,450,000.00	50,676,361,000.00	(12,669,089,000.00)	80.00	
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	83,345,450,000.00	0.00	(83,345,450,000.00)	0.00	
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0.00	50,676,361,000.00	50,676,361,000.00	0.00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAH	106,303,199,008.00	99,210,843,207.00	(7,092,355,801.00)	93.33	
4.3.1	Pendapatan Hibah	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00	100.00	
4.3.1.02	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00	100.00	
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00	100.00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10,769,759,008.00	9,858,849,207.00	(910,909,801.00)	91.54	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pusat	10,769,759,008.00	5,020,679,489.00	(5,749,079,519.00)	46.62	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	1,031,586,042.00	2,163,761,969.00	1,132,175,927.00	209.76	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1,572,068,897.00	0.00	(1,572,068,897.00)	0.00	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,499,025,598.00	0.00	(2,499,025,598.00)	0.00	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1,234,545.00	0.00	(1,234,545.00)	0.00	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Pajak Rokok	5,065,843,928.00	2,856,917,520.00	(2,208,926,408.00)	56.42	
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	0.00	4,838,169,718.00	4,838,169,718.00	0.00	
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	0.00	4,838,169,718.00	4,838,169,718.00	0.00	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	85,383,440,000.00	79,201,994,000.00	(6,181,446,000.00)	92.76	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	85,383,440,000.00	79,201,994,000.00	(6,181,446,000.00)	92.76	
4.3.4.01.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50,725,228,000.00	39,833,782,000.00	(10,891,446,000.00)	78.53	
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0.00	4,710,000,000.00	4,710,000,000.00	0.00	
4.3.4.01.06	Dana Desa	34,658,212,000.00	34,658,212,000.00	0.00	100.00	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00	0.00	100.00	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00	0.00	100.00	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00	0.00	100.00	
5	BELANJA	678,968,889,998.00	502,393,102,208.00	(176,575,587,790.00)	73.99	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	359,109,835,881.00	311,898,363,487.00	(47,203,472,394.00)	86.86	
5.1.1	Belanja Pegawai	280,264,892,025.00	216,557,308,182.00	(43,707,583,843.00)	83.21	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	186,168,335,465.00	162,945,588,282.00	(3,222,747,183.00)	98.27	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	138,365,335,839.00	135,504,775,080.00	(2,860,560,759.00)	99.37	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	14,226,110,553.00	13,675,972,382.00	(550,138,171.00)	96.12	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	3,987,736,949.00	3,742,463,000.00	(245,273,949.00)	93.81	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10,828,284,018.00	10,437,661,534.00	(390,622,482.00)	96.39	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1,516,874,684.00	1,556,786,600.00	40,111,916.00	102.54	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	9,834,246,207.00	8,669,010,960.00	(1,165,237,247.00)	88.15	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,937,170,707.00	3,071,867,564.00	134,696,857.00	104.59	



PEMERINTAHAN KABUPATEN MALAKA
RINGKASAN REALISASI APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUNANGGARAN 2016

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG		DASAR HUKUM
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	755,150,180,604.00	658,502,838,380.40	(96,647,342,223.60)	87.20	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26,482,643,921.00	29,265,208,424.40	2,782,564,503.40	110.51	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6,266,634,513.00	8,828,683,405.74	2,562,048,892.74	140.88	
4.1.1.01	Pajak Hotel	11,177,000.00	21,925,200.00	10,748,200.00	196.16	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	11,177,000.00	21,925,200.00	10,748,200.00	196.16	
4.1.1.02	Pajak Restoran	600,031,642.00	825,854,119.00	225,822,477.00	137.64	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	600,031,642.00	825,854,119.00	225,822,477.00	137.64	
4.1.1.04	Pajak Reklame	93,688,690.00	98,343,976.00	4,655,286.00	104.97	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	93,688,690.00	98,343,976.00	4,655,286.00	104.97	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	818,650,957.00	942,259,650.00	123,608,693.00	115.10	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	818,650,957.00	942,259,650.00	123,608,693.00	115.10	
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	3,500,000,000.00	5,299,048,189.74	1,799,048,189.74	151.40	
4.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	3,500,000,000.00	5,299,048,189.74	1,799,048,189.74	151.40	
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	5,282,874.00	2,200,000.00	(3,082,874.00)	41.64	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	5,282,874.00	2,200,000.00	(3,082,874.00)	41.64	
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,200,000,000.00	1,582,311,371.00	382,311,371.00	131.86	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	1,200,000,000.00	1,582,311,371.00	382,311,371.00	131.86	
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37,803,350.00	56,740,900.00	18,937,550.00	150.09	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	37,803,350.00	56,740,900.00	18,937,550.00	150.09	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5,441,851,160.00	4,226,552,992.00	(1,215,298,168.00)	77.67	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	4,905,727,000.00	3,845,158,942.00	(1,060,568,058.00)	78.38	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	4,566,000,000.00	3,565,500,942.00	(1,000,499,058.00)	78.09	
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	70,000,000.00	45,750,000.00	(24,250,000.00)	65.36	
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	269,727,000.00	233,908,000.00	(35,819,000.00)	86.72	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	295,740,000.00	221,298,000.00	(74,442,000.00)	74.83	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	76,000,000.00	83,016,000.00	7,016,000.00	109.23	
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	45,000,000.00	50,467,000.00	5,467,000.00	112.15	
4.1.2.02.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	54,740,000.00	43,500,000.00	(11,240,000.00)	79.47	
4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	120,000,000.00	44,315,000.00	(75,685,000.00)	36.93	

4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	240,384,160.00	160,096,050.00	(80,288,110.00)	66.60
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	41,963,000.00	41,963,000.00	-	100.00
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	750,000.00	750,000.00	-
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	75,000,000.00	50,723,050.00	(24,276,950.00)	67.63
4.1.2.03.13	Retribusi Ijin Pengeluaran Ternak	123,421,160.00	66,660,000.00	(56,761,160.00)	54.01
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14,774,156,248.00	16,209,972,026.66	1,435,813,778.66	109.72
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	550,497,889.00	478,726,345.00	(71,771,544.00)	86.96
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	2,500,000.00	1,280,000.00	(1,220,000.00)	51.20
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	252,100,453.00	278,898,937.00	26,798,484.00	110.63
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	169,397,436.00	99,541,026.00	(69,856,410.00)	58.76
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	2,500,000.00	221,750.00	(2,278,250.00)	8.87
4.1.4.01.14	Penjualan Hasil Kehutanan	100,000,000.00	77,043,177.00	(22,956,823.00)	77.04
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	4,000,000.00	5,160,000.00	1,160,000.00	129.00
4.1.4.01.21	Sumbangan Pihak Ketiga	20,000,000.00	16,581,455.00	(3,418,545.00)	82.91
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3,325,000,000.00	3,191,335,497.00	(133,664,503.00)	95.98
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3,325,000,000.00	3,191,335,497.00	(133,664,503.00)	95.98
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	2,999,206,000.00	3,498,107,285.00	498,901,285.00	116.63
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	2,999,206,000.00	3,498,107,285.00	498,901,285.00	116.63
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	115,882,359.00	7,825,405.00	(108,056,954.00)	6.75
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	115,882,359.00	7,825,405.00	(108,056,954.00)	6.75
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	7,575,746,000.00	5,661,387,000.00	(1,914,359,000.00)	74.73
4.1.4.16.05	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Betun	1,140,000,000.00	759,437,000.00	(380,563,000.00)	66.62
4.1.4.16.06	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Fahiluka	247,328,600.00	160,087,500.00	(87,241,100.00)	64.73
4.1.4.16.07	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Besikama	1,031,200,000.00	740,215,500.00	(290,984,500.00)	71.78
4.1.4.16.08	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Weliman	713,375,000.00	682,020,500.00	(31,354,500.00)	95.60
4.1.4.16.09	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Weoe	776,124,000.00	664,165,000.00	(111,959,000.00)	85.57
4.1.4.16.10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nanfalus	622,535,400.00	586,311,000.00	(36,224,400.00)	94.18
4.1.4.16.11	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Alas	252,810,000.00	191,166,500.00	(61,643,500.00)	75.62
4.1.4.16.12	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Seon	367,308,000.00	325,598,000.00	(41,710,000.00)	88.64
4.1.4.16.13	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sarina	180,956,000.00	141,683,000.00	(39,273,000.00)	78.30
4.1.4.16.14	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tunabesi	450,848,000.00	282,093,500.00	(168,754,500.00)	62.57
4.1.4.16.15	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kaputu	373,209,000.00	297,384,500.00	(75,824,500.00)	79.68
4.1.4.16.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Uabau	277,184,000.00	195,062,000.00	(82,122,000.00)	70.37
4.1.4.16.17	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nurobo	255,000,000.00	190,082,000.00	(64,918,000.00)	74.54
4.1.4.16.18	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wekmidar	141,856,000.00	91,133,000.00	(50,723,000.00)	64.24
4.1.4.16.19	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Oekmurak	314,000,000.00	105,252,500.00	(208,747,500.00)	33.52
4.1.4.16.20	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Bludukfoho	374,508,000.00	192,515,000.00	(181,993,000.00)	51.40
4.1.4.16.21	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tafuli	57,504,000.00	57,180,500.00	(323,500.00)	99.44

4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	207,826,000.00	764,629,500.00	556,803,500.00	367.92
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	207,826,000.00	764,629,500.00	556,803,500.00	367.92
4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	-	2,607,960,994.66	2,607,960,994.66	-
4.1.4.24.01	Penerimaan Lain-lain	0.00	2,607,960,994.66	2,607,960,994.66	-
4.2	DANA PERIMBANGAN	637,529,028,360.00	539,861,215,240.00	(97,667,813,120.00)	84.68
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,195,267,000.00	8,659,980,240.00	(1,535,286,760.00)	84.94
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	8,216,528,000.00	7,596,915,161.00	(619,612,839.00)	92.46
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	6,141,908,000.00	6,033,028,472.00	(108,879,528.00)	98.23
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	1,580,067,000.00	1,561,972,168.00	(18,094,832.00)	98.85
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	494,553,000.00	1,914,521.00	(492,638,479.00)	0.39
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,978,739,000.00	1,063,065,079.00	(915,673,921.00)	53.72
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	0.00	2,657,730.00	2,657,730.00	-
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	871,090,000.00	0.00	(871,090,000.00)	-
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1,089,194,000.00	471,081,419.00	(618,112,581.00)	43.25
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	0.00	581,232,480.00	581,232,480.00	-
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	18,455,000.00	8,093,450.00	(10,361,550.00)	43.86
4.2.2	Dana Alokasi Umum	434,511,340,000.00	434,511,340,000.00	-	100.00
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	434,511,340,000.00	434,511,340,000.00	-	100.00
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	434,511,340,000.00	434,511,340,000.00	-	100.00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	192,822,421,360.00	96,689,895,000.00	(96,132,526,360.00)	50.14
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	146,318,259,360.00	81,856,796,755.00	(64,461,462,605.00)	55.94
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	2,385,740,000.00	620,019,000.00	(1,765,721,000.00)	25.99
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	11,860,418,020.00	3,264,538,210.00	(8,595,879,810.00)	27.52
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	81,044,341,000.00	57,907,440,945.00	(23,136,900,055.00)	71.45
4.2.3.01.04	DAK Bidang Sanitasi	1,748,920,000.00	1,748,920,000.00	-	-
4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3,923,430,000.00	1,741,735,500.00	(2,181,694,500.00)	44.39
4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	6,116,817,140.00	556,254,000.00	-	-
4.2.3.01.07	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah	35,205,170,000.00	12,973,733,600.00	(22,231,436,400.00)	36.85
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	495,050,000.00	495,050,000.00	-	100.00
4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	1,911,753,200.00	1,911,753,200.00	-	100.00
4.2.3.01.12	DAK Bidang Kehutanan	697,590,000.00	250,862,000.00	(446,728,000.00)	35.96
4.2.3.01.14	DAK Bidang Perdagangan	608,090,000.00	112,560,300.00	(495,529,700.00)	18.51
4.2.3.01.15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	320,940,000.00	273,930,000.00	(47,010,000.00)	85.35
4.2.3.02	DAK Non Fisik	46,504,162,000.00	14,833,098,245.00	(31,671,063,755.00)	31.90
4.2.3.02.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	43,684,312,000.00	13,600,000,000.00	(30,084,312,000.00)	31.13
4.2.3.02.02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,338,000,000.00	1,156,000,000.00	(182,000,000.00)	86.40
4.2.3.02.03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1,284,000,000.00	48,500,000.00	(1,235,500,000.00)	3.78
4.2.3.02.08	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	197,850,000.00	28,598,245.00	(169,251,755.00)	14.45

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	91,138,508,323.00	89,376,414,716.00	(1,762,093,607.00)	98.07
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	13,200,702,323.00	11,604,790,543.00	(1,595,911,780.00)	87.91
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pusat	13,200,702,323.00	11,604,790,543.00	(1,595,911,780.00)	87.91
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	1,007,973,432.00	818,924,403.00	(189,049,029.00)	81.24
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1,404,898,386.00	1,160,880,197.00	(244,018,189.00)	82.63
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,824,399,701.00	2,557,702,628.00	(266,697,073.00)	90.56
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Pajak Rokok	7,963,430,804.00	7,067,283,315.00	(896,147,489.00)	88.75
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	77,757,806,000.00	77,591,624,173.00	(166,181,827.00)	99.79
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	77,757,806,000.00	77,591,624,173.00	(166,181,827.00)	99.79
4.3.4.01.06	Dana Desa	77,757,806,000.00	77,591,624,173.00	(166,181,827.00)	99.79
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	180,000,000.00	180,000,000.00	-	100.00
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	180,000,000.00	180,000,000.00	-	100.00
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	180,000,000.00	180,000,000.00	-	100.00
	PEMBIAYAAN NETTO				
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN				

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN



PEMERINTAHAN KABUPATEN MALAKA
RINGKASAN REALISASI APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

LAMPIRAN I.A : PERATURAN BUPATI MALAKA
 NOMOR
 TANGGAL

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG		DASAR HUKUM
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	835.270.274.407.10	823.512.988.697.48	(11.757.285.709.62)	98.59	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.308.478.854.00	54.789.189.990.38	1.480.711.136.38	102.78	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.126.412.690.00	9.695.232.176.30	568.819.486.30	106.23	
4.1.1.01	Pajak Hotel	22.000.000.00	41.475.000.00	19.475.000.00	188.52	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.01.	Hotel Melati Tiga	22.000.000.00	41.475.000.00	19.475.000.00	188.52	
4.1.1.02	Pajak Restoran	750.000.000.00	851.308.546.00	101.308.546.00	113.51	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.02.	Rumah Makan	750.000.000.00	851.308.546.00	101.308.546.00	113.51	
4.1.1.04	Pajak Reklame	101.312.690.00	101.736.109.00	423.419.00	100.42	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.04.	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Meqatron	101.312.690.00	101.736.109.00	423.419.00	100.42	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	1.000.000.000.00	1.405.124.016.00	405.124.016.00	140.51	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.05.	Paiaik Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000.00	1.405.124.016.00	405.124.016.00	140.51	
4.1.1.06	Pajak Penqambilan Bahan Galian Golongqan C	5.750.000.000.00	5.760.857.418.30	10.857.418.30	100.19	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.06.	Batu Gununa/Kali	5.750.000.000.00	5.760.857.418.30	10.857.418.30	100.19	
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	2.200.000.00	-	(2.200.000.00)	-	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.08.	Paiaik Air Bawah Tanah	2.200.000.00	-	(2.200.000.00)	-	
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Banqunan (PBB)	1.400.000.000.00	1.438.889.937.00	38.889.937.00	102.78	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.11.	PBB Sektor Perkotaan	1.400.000.000.00	1.438.889.937.00	38.889.937.00	102.78	
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banqunan (BPHTB)	100.000.000.00	94.941.150.00	(5.058.850.00)	94.94	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.12.	BPHTB - Pemindahan Hak	100.000.000.00	94.941.150.00	(5.058.850.00)	94.94	
4.1.1.13	Pajak Air Permukaan	900.000.00	900.000.00	-	100.00	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.13.	Paiaik Air Permukaan	900.000.00	900.000.00	0.00	100.00	Pergub. Nusa Tenggara Timur No.14 Tahun 2017
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.211.000.000.00	6.514.217.882.00	303.217.882.00	104.88	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	5.454.000.000.00	5.815.804.512.00	361.804.512.00	106.63	
4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.104.000.000.00	5.493.134.512.00	389.134.512.00	107.62	Perda Kab.Malaka No.13 Tahun 2016
4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000.00	56.060.000.00	(43.940.000.00)	56.06	Perda Kab.Malaka Nomor 13 Tahun 2016
4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	250.000.000.00	266.610.000.00	16.610.000.00	106.64	Perda Kab.Malaka Nomor 13 Tahun 2016
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	342.000.000.00	269.520.000.00	(72.480.000.00)	78.81	
4.1.2.02.	Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah - Penvewaan Tanah	35.000.000.00	12.631.000.00	(22.369.000.00)	36.09	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016
4.1.2.02.	Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah - Laboratorium	85.000.000.00	72.199.000.00	(12.801.000.00)	84.94	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016
4.1.2.02.	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan	45.000.000.00	46.500.000.00	1.500.000.00	103.33	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016
4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	12.000.000.00	10.160.000.00	(1.840.000.00)	84.67	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016
4.1.2.02.	Retribusi Rumah Potong Hewan	45.000.000.00	45.230.000.00	230.000.00	100.51	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016
4.1.2.02.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	120.000.000.00	82.800.000.00	(37.200.000.00)	69.00	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016

4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	415.000.000.00	428.893.370.00	13.893.370.00	103.35	
4.1.2.03	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	185.000.000.00	114.207.950.00	(70.792.050.00)	61.73	Perda Kab.Malaka Nomor 15 Tahun 2016
4.1.2.03	Retribusi Izin Gancuan tempat Usaha/Kegiatan kepada	150.000.000.00	244.935.420.00	94.935.420.00	163.29	Perda Kab.Malaka Nomor 15 Tahun 2016
4.1.2.03	Retribusi Ijin Penyelesaian Ternak	80.000.000.00	69.750.000.00	(10.250.000.00)	87.19	Perda Kab.Malaka Nomor 15 Tahun 2016
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	232.398.357.00	232.398.357.00	-	100.00	
4.1.3.01	Bağian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik	232.398.357.00	232.398.357.00	-	100.00	
4.1.3.01	Bağian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik	232.398.357.00	232.398.357.00	0,00	100.00	Perda Kab.Malaka Nomor 17 Tahun 2016
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.738.667.807.00	38.347.341.575.08	608.673.768.08	101.61	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	29.000.000.00	20.116.211.00	(8.883.789.00)	69.37	
4.1.4.01	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	2.500.000.00	20.116.211.00	17.616.211.00	804.65	
4.1.4.01	Penjualan Hasil Pertanian	2.500.000.00	-	(2.500.000.00)	-	
4.1.4.01	Penjualan Hasil Kehutanan	0.00	-	0.00	-	
4.1.4.01	Penjualan Hasil Peternakan	4.000.000.00	-	(4.000.000.00)	-	
4.1.4.01	Sumbangan Pihak Ketiga	20.000.000.00	-	(20.000.000.00)	-	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000.00	714.048.875.00	(785.951.125.00)	47.60	
4.1.4.02	Jasa Giro Kas Daerah	1.500.000.000.00	714.048.875.00	(785.951.125.00)	47.60	PP Nomor 39 Tahun 2007
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	7.000.000.000.00	9.102.835.756.00	2.102.835.756.00	130.04	
4.1.4.03	Rekening Deposito Pada Bank	7.000.000.000.00	9.102.835.756.00	2.102.835.756.00	130.04	PP Nomor 39 Tahun 2007
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	394.521.807.00	-	(394.521.807.00)	-	
4.1.4.04	Kerugian Uang	394.521.807.00	-	(394.521.807.00)	-	
4.1.4.05	Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya	-	3.926.312.233.08	3.926.312.233.08	-	
	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	1.887.219.118.64	1.887.219.118.64	-	
	Denda Pajak	0.00	319.768.656.44	319.768.656.44	-	
	Penyeteroran atas Temuan	0.00	1.266.379.815.00	1.266.379.815.00	-	
	Anasuran/Cicilan Penjualan Kendaraan	0.00	212.000.000.00	212.000.000.00	-	
	Penerimaan Lain-lain	0.00	240.944.643.00	240.944.643.00	-	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	7.575.746.000.00	7.362.638.500.00	(213.107.500.00)	97.19	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Betun	1.140.000.000.00	826.219.000.00	(313.781.000.00)	72.48	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Fahiluka	247.328.600.00	200.990.000.00	(46.338.600.00)	81.26	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Besikama	1.031.200.000.00	897.568.500.00	(133.631.500.00)	87.04	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Weliman	713.375.000.00	978.446.000.00	265.071.000.00	137.16	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Weoe	582.493.000.00	967.568.000.00	385.075.000.00	166.11	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nanfalus	466.901.550.00	759.748.000.00	292.846.450.00	162.72	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Alas	252.810.000.00	227.640.000.00	(25.170.000.00)	90.04	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Seon	367.308.000.00	515.040.000.00	147.732.000.00	140.22	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sarina	180.956.000.00	168.757.500.00	(12.198.500.00)	93.26	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tunabesi	338.136.000.00	353.860.500.00	15.724.500.00	104.65	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kaputu	373.209.000.00	439.649.000.00	66.440.000.00	117.80	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Uabau	277.184.000.00	232.540.500.00	(44.643.500.00)	83.89	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nurobo	255.000.000.00	187.950.000.00	(67.050.000.00)	73.71	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wekmidar	141.956.000.00	110.037.000.00	(31.919.000.00)	77.51	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Oekmurak	314.000.000.00	159.961.500.00	(154.038.500.00)	50.94	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Biudukfoho	374.508.000.00	253.021.500.00	(121.486.500.00)	67.56	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tafuli	57.504.000.00	83.641.500.00	26.137.500.00	145.45	
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Alkani	194.031.000.00	-	(194.031.000.00)	-	Perda.Kab.Malaka Nomor 12 Tahun 2016
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Babulu	155.633.850.00	-	(155.633.850.00)	-	Perda.Kab.Malaka Nomor 13 Tahun 2016
4.1.4.16	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Bani - Bani	112.212.000.00	-	(112.212.000.00)	-	Perda.Kab.Malaka Nomor 13 Tahun 2016
4.1.4.25	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	21.239.400.000.00	17.221.390.000.00	(4.018.010.000.00)	81.08	
4.1.4.25	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	21.239.400.000.00	17.221.390.000.00	(4.018.010.000.00)	81.08	

4.2	DANA PERIMBANGAN	669.616.444.026.00	653.693.624.521.00	(15.922.819.505.00)	97.62	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8.767.437.000.00	7.839.210.617.00	(928.226.383.00)	89.41	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	7.231.295.000.00	6.951.419.053.00	(279.875.947.00)	96.13	
4.2.1.01.1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor	5.084.338.000.00	4.300.105.358.00	(784.232.642.00)	84.58	Perpres Nomor 36 Tahun 2015
4.2.1.01.2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	2.146.957.000.00	2.603.844.078.00	456.887.078.00	121.28	Perpres Nomor 36 Tahun 2015
4.2.1.01.3	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.00	47.469.617.00	47.469.617.00	-	PMK No.135/PMK.07/2015
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.536.142.000.00	887.791.564.00	(648.350.436.00)	896.29	
4.2.1.02.1	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Penguasaan Hutan	0.00	520.350.00	520.350.00	-	
4.2.1.02.2	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	3.469.000.00	2.570.540.00	(898.460.00)	74.10	Perpres Nomor 36 Tahun 2015
4.2.1.02.3	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	18.843.000.00	116.632.248.00	97.789.248.00	618.97	Perpres Nomor 36 Tahun 2015
4.2.1.02.4	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi	0.00	5.441.500.00	5.441.500.00	-	
4.2.1.02.5	Bagi Hasil Dari Puncutan Hasil Perikanan	1.493.124.000.00	525.572.127.00	(967.551.873.00)	35.20	Perpres Nomor 36 Tahun 2015
4.2.1.02.6	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	0.00	202.263.400.00	202.263.400.00	-	
4.2.1.02.7	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	20.706.000.00	34.791.399.00	14.085.399.00	168.03	Perpres Nomor 36 Tahun 2015
4.2.2	Dana Alokasi Umum	431.015.290.000.00	431.015.290.000.00	0.00	100.00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	431.015.290.000.00	431.015.290.000.00	0.00	100.00	Perpres No 97/2016 dan PMK No.127/PMK.7/2017
4.2.2.01.1	Dana Alokasi Umum	431.015.290.000.00	431.015.290.000.00	0.00	100.00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	229.833.717.026.00	214.839.123.904.00	(14.994.593.122.00)	93.48	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	183.835.176.026.00	169.661.852.394.00	(14.173.323.632.00)	92.29	
4.2.3.01.1	DAK Bidang Pendidikan	36.222.957.226.00	4.348.201.000.00	(31.874.756.226.00)	12.00	PERATURAN PRESIDEN NO.97 TAHUN 2016
4.2.3.01.2	DAK Bidang Kesehatan	28.404.333.000.00	77.639.109.000.00	49.234.776.000.00	273.34	
4.2.3.01.3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	25.493.512.000.00	72.442.513.892.00	46.949.001.892.00	284.16	
4.2.3.01.4	DAK Bidang Infrastruktur Iriqasi	5.272.910.000.00	4.599.476.000.00	(673.434.000.00)	87.23	
4.2.3.01.5	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	5.824.438.100.00	4.841.986.258.00	(982.451.842.00)	83.13	
4.2.3.01.6	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah	15.587.401.000.00	482.839.244.00	(15.104.561.756.00)	3.10	
4.2.3.01.7	DAK Bidang Pertanian	1.009.921.000.00	950.993.000.00	(58.928.000.00)	94.17	
4.2.3.01.8	DAK Bidang Perdaanangan	2.294.788.700.00	2.174.831.000.00	(119.957.700.00)	94.77	
4.2.3.01.9	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	0.00	986.550.000.00	986.550.000.00	-	
4.2.3.01.10	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	63.724.915.000.00	1.195.353.000.00	(62.529.562.000.00)	1.88	
4.2.3.02	DAK Non Fisik	45.998.541.000.00	45.177.271.510.00	(821.269.490.00)	98.21	
4.2.3.02.1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	25.167.313.000.00	25.155.254.000.00	(12.059.000.00)	99.95	
4.2.3.02.2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.835.000.000.00	2.835.000.000.00	0.00	100.00	
4.2.3.02.3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia	927.000.000.00	927.000.000.00	0.00	100.00	
4.2.3.02.4	Bantuan Operasional Kesehatan	12.141.468.000.00	14.098.624.910.00	1.957.156.910.00	116.12	tengki lihat rincian
4.2.3.02.5	Akreditasi Rumah Sakit	475.000.000.00	0.00	(475.000.000.00)	-	
4.2.3.02.6	Jaminan Persalinan	2.116.564.000.00	0.00	(2.116.564.000.00)	-	
4.2.3.02.7	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	345.870.000.00	172.935.000.00	(172.935.000.00)	50.00	
4.2.3.02.8	Tunjangan Khusus Guru	1.239.516.000.00	1.237.647.600.00	(1.868.400.00)	99.85	
4.2.3.02.9	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	750.810.000.00	750.810.000.00	0.00	100.00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	112.345.351.527.10	115.030.174.186.10	2.684.822.659.00	102.39	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	13.098.722.527.10	15.996.804.778.10	2.898.082.251.00	122.12	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	13.098.722.527.10	15.996.804.778.10	1.822.869.376.00	506.63	Pergub. Nusa Tenggara Timur No.14 Tahun 2017
4.3.3.01.1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	679.332.799.00	1.279.749.338.00	600.416.539.00	188.38	Pergub. Nusa Tenggara Timur No.14 Tahun 2017
4.3.3.01.2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.333.699.069.00	840.589.108.00	(493.109.961.00)	63.03	Pergub. Nusa Tenggara Timur No.14 Tahun 2017
4.3.3.01.3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.965.347.544.00	3.377.492.999.00	412.145.455.00	113.90	Pergub. Nusa Tenggara Timur No.14 Tahun 2017
4.3.3.01.4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air	6.712.377.10	1.691.321.10	(5.021.056.00)	25.20	Pergub. Nusa Tenggara Timur No.14 Tahun 2017
4.3.3.01.5	Bagi Hasil Pajak Rokok	8.113.630.738.00	9.422.069.137.00	1.308.438.399.00	116.13	Pergub. Nusa Tenggara Timur No.14 Tahun 2017
4.3.3.01.6	Bagi hasil dari bea balik nama kendaran diatas air	0.00	1.075.212.875.00	0.00	-	tengki lihat rincian
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99.246.629.000.00	99.033.369.408.00	(213.259.592.00)	99.79	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	99.246.629.000.00	99.033.369.408.00	(213.259.592.00)	99.79	
4.3.4.01.1	Dana Desa	99.246.629.000.00	99.033.369.408.00	(213.259.592.00)	99.79	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	0.00	0.00	0.00	-	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0.00	0.00	0.00	-	

4.3.5.01

Bantuan Keuangan Dari Provinsi

0.00

0.00

Betun, 31 Desember 2017
BUPATI MALAKA

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran I.a Rancangan Perjabaran Pertanggungjawaban 2018

Nomor : xxx Tahun 2019

Tanggal : xxx Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	%	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6.00	7
4	PENDAPATAN	786,902,238,114.66	753,814,119,597.48	(33,088,118,517.18)	95.80	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44,644,364,769.66	41,059,361,102.48	(3,585,003,667.18)	91.97	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9,917,676,276.00	7,841,367,585.43	(2,076,308,690.57)	79.06	
4.1.1.01	Pajak Hotel	54,512,000.00	102,914,000.00	48,402,000.00	188.79	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	54,512,000.00	102,914,000.00	48,402,000.00	188.79	
4.1.1.02	Pajak Restoran	825,000,000.00	994,563,391.00	169,563,391.00	120.55	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.02.02	Rumah Makan	825,000,000.00	834,658,771.00	9,658,771.00	101.17	
4.1.1.02.06	Warung	0.00	159,904,620.00	159,904,620.00	-	
4.1.1.04	Pajak Reklame	114,962,751.00	114,054,238.00	(908,513.00)	99.21	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	114,962,751.00	114,054,238.00	(908,513.00)	99.21	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	1,500,000,000.00	1,798,592,166.00	298,592,166.00	119.91	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1,500,000,000.00	1,798,592,166.00	298,592,166.00	119.91	
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	5,750,000,000.00	2,923,980,633.43	(2,826,019,366.57)	50.85	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	5,750,000,000.00	2,923,980,633.43	(2,826,019,366.57)	50.85	
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	100.00	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	100.00	
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,500,000,000.00	1,712,656,332.00	212,656,332.00	114.18	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	1,500,000,000.00	1,712,656,332.00	212,656,332.00	114.18	

4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	170,551,525.00	191,956,825.00	21,405,300.00	112.55	Perda Kab.Malaka No.12 Tahun 2016
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	170,551,525.00	150,323,700.00	(20,227,825.00)	88.14	
4.1.1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	0.00	41,633,125.00	41,633,125.00	-	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11,601,254,000.00	10,377,148,043.00	(1,224,105,957.00)	89.45	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10,594,254,000.00	9,969,783,250.00	(624,470,750.00)	94.11	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	124,254,000.00	10,811,000.00	(113,443,000.00)	8.70	Perda Kab.Malaka No.13 Tahun 2016
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	10,000,000,000.00	9,476,952,250.00	(523,047,750.00)	94.77	Perda Kab.Malaka No.13 Tahun 2016
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	120,000,000.00	62,500,000.00	(57,500,000.00)	52.08	Perda Kab.Malaka No.13 Tahun 2016
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	350,000,000.00	419,520,000.00	69,520,000.00	119.86	Perda Kab.Malaka No.13 Tahun 2016
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	623,050,000.00	281,059,000.00	(341,991,000.00)	45.11	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	10,000,000.00	11,000,000.00	1,000,000.00	110.00	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	100,000,000.00	113,315,000.00	13,315,000.00	113.32	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	70,000,000.00	45,500,000.00	(24,500,000.00)	65.00	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016
4.1.2.02.18	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	17,000,000.00	12,040,000.00	(4,960,000.00)	70.82	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016
4.1.2.02.19	Retribusi Rumah Potong Hewan	60,000,000.00	43,040,000.00	(16,960,000.00)	71.73	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016
4.1.2.02.22	Retribusi Tempat Pariwisata	60,000,000.00	35,814,000.00	(24,186,000.00)	59.69	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016
4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	300,000,000.00	20,350,000.00	(279,650,000.00)	6.78	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016
4.1.2.02.31	Retribusi Laboratorium Kesehatan Hewan	6,050,000.00	0.00	(6,050,000.00)	-	Perda Kab.Malaka Nomor 14 Tahun 2016
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	383,950,000.00	126,305,793.00	(257,644,207.00)	32.90	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	250,000,000.00	43,778,433.00	(206,221,567.00)	17.51	Perda Kab.Malaka Nomor 15 Tahun 2016
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-	Perda Kab.Malaka Nomor 15 Tahun 2016
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	75,000,000.00	21,377,360.00	(53,622,640.00)	28.50	Perda Kab.Malaka Nomor 15 Tahun 2016
4.1.2.03.13	Retribusi Ijin Pengeluaran Ternak	58,950,000.00	58,950,000.00	0.00	100.00	Perda Kab.Malaka Nomor 15 Tahun 2016
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,512,871,635.00	3,512,871,635.00	0.00	100.00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3,512,871,635.00	3,512,871,635.00	0.00	100.00	Perda Kab.Malaka Nomor 17 Tahun 2016
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3,512,871,635.00	3,512,871,635.00	0.00	100.00	PP Nomor 39 Tahun 2007
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19,612,562,858.66	19,327,973,839.05	(284,589,019.61)	98.55	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	29,000,000.00	8,374,666.00	(20,625,334.00)	28.88	
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	2,500,000.00	3,874,666.00	1,374,666.00	154.99	
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	2,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	-	
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	4,000,000.00	4,500,000.00	500,000.00	112.50	
4.1.4.01.21	Sumbangan Pihak Ketiga	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	-	

4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1,000,000,000.00	1,392,749,814.00	392,749,814.00	139.27	PP Nomor 39 Tahun 2007
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1,000,000,000.00	356,921,236.00	(643,078,764.00)	35.69	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	0.00	1,035,828,578.00	1,035,828,578.00		
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	8,013,387,206.00	7,386,093,687.00	(627,293,519.00)	92.17	PP Nomor 39 Tahun 2007
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	8,013,387,206.00	7,386,093,687.00	(627,293,519.00)	92.17	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	394,521,807.00	128,695,774.00	(265,826,033.00)	32.62	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	394,521,807.00	128,695,774.00	(265,826,033.00)	32.62	
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1,500,000,000.00	2,376,014,694.28	876,014,694.28	158.40	
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	-	
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	0.00	1,433,481,632.14	1,433,481,632.14	-	
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	1,500,000,000.00	911,039,562.14	(588,960,437.86)	60.74	
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidupn	0.00	28,393,500.00	28,393,500.00	-	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	49,255,067.66	102,879,332.93	53,624,265.27	208.87	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	345,570.00	2,259,070.00	1,913,500.00	653.72	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2,117,648.00	17,454,420.00	15,336,772.00	824.24	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	121,110.00	148,440.00	27,330.00	122.57	
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	43,960,310.66	78,362,771.93	34,402,461.27	178.26	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2,710,429.00	4,654,631.00	1,944,202.00	171.73	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	0.00	7,047,000.00	7,047,000.00	-	
4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0.00	7,047,000.00	7,047,000.00	-	
4.1.4.13	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	50,652,778.00	0.00	(50,652,778.00)	-	
4.1.4.13.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan	50,652,778.00	0.00	(50,652,778.00)	-	

4.1.4.16	Pendapatan BLUD					
4.1.4.16.05	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Betun	8,575,746,000.00	6,695,576,500.00	(1,880,169,500.00)	78.08	Perpres No.32 Tahun 2014
4.1.4.16.06	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Fahiluka	1,190,000,000.00	973,415,500.00	(216,584,500.00)	81.80	
4.1.4.16.07	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Besikama	297,328,600.00	180,709,500.00	(116,619,100.00)	60.78	
4.1.4.16.08	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wellman	1,081,200,000.00	948,996,000.00	(132,204,000.00)	87.77	
4.1.4.16.09	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Weoe	763,375,000.00	736,846,500.00	(26,528,500.00)	96.52	
4.1.4.16.10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nanfalus	632,493,000.00	860,022,000.00	227,529,000.00	135.97	
4.1.4.16.11	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Alas	516,901,550.00	728,330,000.00	211,428,450.00	140.90	
4.1.4.16.12	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Seon	302,810,000.00	168,925,500.00	(133,884,500.00)	55.79	
4.1.4.16.13	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sarina	417,308,000.00	424,815,000.00	7,507,000.00	101.80	
4.1.4.16.14	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tunabesi	230,956,000.00	164,278,500.00	(66,677,500.00)	71.13	
4.1.4.16.15	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kaputu	388,136,000.00	273,769,500.00	(114,366,500.00)	70.53	
4.1.4.16.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Uabau	423,209,000.00	298,251,500.00	(124,957,500.00)	70.47	
4.1.4.16.17	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nurobo	327,184,000.00	170,641,500.00	(156,542,500.00)	52.15	
4.1.4.16.18	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nurobo	305,000,000.00	189,133,500.00	(115,866,500.00)	62.01	
4.1.4.16.19	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wekmidar	191,956,000.00	110,617,500.00	(81,338,500.00)	57.63	
4.1.4.16.20	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Oekmurak	364,000,000.00	108,783,000.00	(255,217,000.00)	29.89	
4.1.4.16.21	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Biudukfoho	424,508,000.00	271,994,000.00	(152,514,000.00)	64.07	
4.1.4.16.22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tafuli	107,504,000.00	86,047,500.00	(21,456,500.00)	80.04	
4.1.4.16.23	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Alkani	244,031,000.00	0.00	(244,031,000.00)	-	Perda.Kab.Malaka Nomor 12 Tahun 2016
4.1.4.16.24	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Babulu	205,633,850.00	0.00	(205,633,850.00)	-	Perda.Kab.Malaka Nomor 12 Tahun 2016
4.1.4.16.24	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Bani - Bani	162,212,000.00	0.00	(162,212,000.00)	-	Perda.Kab.Malaka Nomor 13 Tahun 2016
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0.00	1,129,532,722.84	1,129,532,722.84	-	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0.00	1,129,532,722.84	1,129,532,722.84	-	
4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	0.00	101,009,648.00	101,009,648.00	-	
4.1.4.24.01	Penerimaan Lain-lain	0.00	101,009,648.00	101,009,648.00	-	
4.2	DANA PERIMBANGAN	592,066,829,000.00	581,709,695,807.00	(10,357,133,193.00)	98.25	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8,315,442,000.00	6,879,609,602.00	(1,435,832,398.00)	82.73	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	7,320,492,000.00	6,115,560,508.00	(1,204,931,492.00)	83.54	Perpres Nomor 36 Tahun 2015
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4,583,369,000.00	4,345,033,819.00	(238,335,181.00)	94.80	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	2,737,123,000.00	1,770,526,689.00	(966,596,311.00)	64.69	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	994,950,000.00	764,049,094.00	(230,900,906.00)	76.79	Perpres Nomor 36 Tahun 2015
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	3,838,000.00	1,151,400.00	(2,686,600.00)	30.00	
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	1,317,000.00	40,762,243.00	39,445,243.00	3,095.08	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	943,027,000.00	701,234,591.00	(241,792,409.00)	74.36	
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	46,768,000.00	20,900,860.00	(25,867,140.00)	44.69	

4.2.2	Dana Alokasi Umum	436,377,451,000.00	436,038,466,799.00	(338,984,201.00)	99.92
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	436,377,451,000.00	436,038,466,799.00	(338,984,201.00)	99.92 Perpres No 97/2016 dan PMK No.127/PMK-7/2017
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	436,377,451,000.00	436,038,466,799.00	(338,984,201.00)	99.92
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	147,373,936,000.00	138,791,619,406.00	(8,582,316,594.00)	94.18
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)				
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	92,884,888,000.00	89,155,011,156.00	(3,729,876,844.00)	95.98 PERATURAN PRESIDEN NO.97 TAHUN 2016
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	5,993,000,000.00	5,285,245,200.00	(707,754,800.00)	88.19
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	42,208,888,000.00	35,490,766,364.00	(6,718,121,636.00)	84.08
4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	23,801,000,000.00	23,347,166,000.00	(453,834,000.00)	98.09
4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	2,984,000,000.00	2,831,683,000.00	(152,317,000.00)	94.90
4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	3,186,000,000.00	3,115,046,925.00	(70,953,075.00)	97.77
4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	7,500,000,000.00	7,368,304,656.00	(131,695,344.00)	98.24
4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana	1,601,000,000.00	1,600,724,000.00	(276,000.00)	99.98
4.2.3.01.15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	862,000,000.00	5,562,144,700.00	4,700,144,700.00	645.26
		4,749,000,000.00	4,553,930,311.00	(195,069,689.00)	95.89
4.2.3.02	DAK Non Fisik				
4.2.3.02.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	54,489,048,000.00	49,636,608,250.00	(4,852,439,750.00)	91.09
4.2.3.02.02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	29,852,231,000.00	28,146,685,860.00	(1,705,545,140.00)	94.29
4.2.3.02.03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2,697,000,000.00	1,483,350,000.00	(1,213,650,000.00)	55.00
4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	667,200,000.00	667,200,000.00	0.00	100.00
4.2.3.02.06	Bantuan Operasional Kesehatan	12,596,569,000.00	15,225,064,890.00	2,628,495,890.00	120.87
4.2.3.02.07	Akreditasi Puskesmas	1,500,000,000.00	0.00	(1,500,000,000.00)	-
4.2.3.02.08	Jaminan Persalinan	2,443,158,000.00	0.00	(2,443,158,000.00)	-
4.2.3.02.09	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2,591,730,000.00	2,591,385,000.00	(345,000.00)	99.99
4.2.3.02.10	Tunjangan Khusus Guru	2,591,730,000.00	2,591,385,000.00	(345,000.00)	99.99
4.2.3.02.11	Tunjangan Khusus Guru	1,285,237,000.00	706,880,000.00	(578,357,000.00)	55.00
4.2.3.02.12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	855,923,000.00	816,042,500.00	(39,880,500.00)	95.34
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	150,191,044,345.00	131,045,062,688.00	(19,145,981,657.00)	87.25
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17,945,998,345.00	16,220,848,096.00	(1,725,150,249.00)	90.39
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	17,945,998,345.00	16,220,848,096.00	(1,725,150,249.00)	90.39
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2,317,455,358.00	2,075,284,156.00	(242,171,202.00)	89.55 Pergub. Nusa Tenggara Timur No.14 Tahun 2017
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3,934,659,032.00	3,964,038,862.00	29,379,830.00	100.75 Pergub. Nusa Tenggara Timur No.14 Tahun 2017
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4,645,454,546.00	3,961,801,121.00	(683,653,425.00)	85.28 Pergub. Nusa Tenggara Timur No.14 Tahun 2017
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2,432,727.00	9,325,187.00	6,892,460.00	383.32 Pergub. Nusa Tenggara Timur No.14 Tahun 2017
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Pajak Rokok	7,045,996,682.00	6,210,398,770.00	(835,597,912.00)	88.14 Pergub. Nusa Tenggara Timur No.14 Tahun 2017

4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	95,196,646,000.00	95,187,554,592.00	(9,091,408.00)	99.99
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	95,196,646,000.00	95,187,554,592.00	(9,091,408.00)	99.99
4.3.4.01.06	Dana Desa	95,196,646,000.00	95,187,554,592.00	(9,091,408.00)	99.99
4.3.8	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	37,048,400,000.00	19,636,660,000.00	(17,411,740,000.00)	53.00
4.3.8.01	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	37,048,400,000.00	19,636,660,000.00	(17,411,740,000.00)	53.00
4.3.8.01.01	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	37,048,400,000.00	19,636,660,000.00	(17,411,740,000.00)	53.00

Betun, xxx 2019
 BUPATI MALAKA

STEFANUS BRIA SERAN

malakabund